

## ABSTRAKSI

**Sri Wahyuni, 031141111. 2013. PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio legis* dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, memberikan analisa yuridis pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka. Analisa bahan hukum dilaksanakan dengan memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian dan mengkualitatifkan data sebagai fokus utama dari penelitian hukum ini sehingga dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama, *ratio legis* dimasukkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena masih ada Ketetapan MPR yang berlaku yang merupakan aturan dasar dan belum dibentuk peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, wewenang pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di tangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi dengan tidak menutup peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang untuk meninjau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih ada.

**Kata kunci :** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tata urutan peraturan perundang-undangan

**ABSTRACT**

**Sri Wahyuni, 031141111. 2013. THE REVIEW OF THE DECISION OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM. Faculty of Law Airlangga University.**

The purpose of this research is to identify the ratio legis include of returning the Decision of The People's Consultative Assembly into the law and regulation sequence in Indonesia and the review authority of the Decision of The People's Consultative Assembly in the Indonesian legal system.

This research is a legal research, provide analysis of the review of the Decision of The People's Consultative Assembly in the Indonesian legal system. The approaches used in this research are the historical approach, the approach of the concept, and the approach of legislation. The sources of this research are the primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting the source of this research is to study the documents. The analysis technique of legal materials is carried out by understanding the symptoms of the objects which is researched and then describing the data obtained during the study and qualifying the data as the main focus of this legal research in order to provide complete and comprehensive description of the phenomenon of the investigation, and ultimately provide for the solutif conclusion to solve the problems of this research by providing the necessary recommendations. The reasoning method used is the method of deductive reasoning (logic).

The results of the analysis on this research results the conclusions. First, ratio legis include of returning the Decision of The People's Consultative Assembly into the law and regulation sequence of Indonesia because some of the Decision of The People's Consultative Assembly are still going into effect representing and not yet been formed new regulation according to The Constitution State Republic Of Indonesia Year 1945. 1945. Second, the authority of review of the Decision of The People's Consultative Assembly is in Constitutional Court as a guard of the constitution and the single interpreter without closing role of The People's Consultative Assembly as institute in charge to evaluate the Decision of The People's Consultative Assembly.

**Keywords :** the Decision of The People's Consultative Assembly, law and regulation sequence